

## TAJUK RENCANA

### Masa Kampanye Pemilu Diperpendek

AKHIRNYA DPR - KPU sepakat masa kampanye tetap 75 hari. Ini jauh dari dari jadwal kampanye Pemilu 2019 yang berlangsung selama 5 bulan, dari 23 September 2018 sampai 13 April 2019. Masa kampanye yang sangat melelahkan, menguras bukan hanya duit, tetapi tenaga bahkan sampai mengorbankan kerukunan. Bangsa ini seperti terbebani, tercerai berai dan terkotak-kotak yang terlalu panjang.

Dalam pemilu yang akan digelar serentak 2024 tersebut, DPR juga telah mensahkan anggaran Rp 7,6 triliun (KR 7/6). Biaya tersebut untuk tahapan sampai paripurnanya pesta demokrasi itu. DPR juga berharap pemerintah segera mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) yang akan mengatur masalah pengadaan logistik, untuk melancarkan jalannya pemilu. Pengaturan logistik diperlukan, mengingat lokasi coblosan bukan hanya di kota besar yang gampang dijangkau kendaraan, namun banyak desa-desa yang lokasi jauh dari kota, yang tak bisa dijangkau kendaraan mobil misalnya. Meski masih tersisa waktu hampir 2 tahun, namun KPU harus segera *cek-cek, cercep* (gerak cepat). Karena masih banyak yang harus dikerjakan, mengaca pada Pemilu 2019 lalu.

Misalnya, keluhan terlalu banyak kertas suara sehingga malah membuat rancu sebagian masyarakat. Misalnya mulai dari kartu suara, yang dianggap masyarakat terlalu banyak. Kalau Pemilu 2019 menggunakan 5 lembar kertas suara, maka tentu disahkan dalam Pemilu 2024 bisa lebih disederhanakan. Sehingga warga ketika di ruang coblosan akan lebih mudah dan nyaman. Karena kebanyakan kartu suara tersebut, bukan hanya dikeluarkan warga namun juga dikeluarkan petugas KPSS, yang rata-rata sudah sepuh.

Dalam catatan kami, dari pelaksanaan

KPPS yang meninggal ada 894 petugas yang mengawal, menghitung kotak suara kemudian yang menderita sakit 5.175 orang. Keluhan tersebut terlalu banyaknya kertas suara dan yang kurang memanfaatkan e-rekapitulasi, sehingga tenaga manual yang kebanyakan sudah usia menjelang senja, tak tahan secara fisik. Kelelahan ini yang membuat kesakitan. Karena itulah musli dicari apa yang membuat beban kerja tambah.

Itulah yang memang harus dipikirkan. Aspek kesehatan para petugas pemilu khususnya untuk pemungutan suara harus menjadi perhatian besar. Agar warga tetap bersedia menjadi petugas pemungutan suara, supaya kejadian tersebut tidak terulang dalam Pemilu 2024.

Masalah lain yang menjadi PR adalah penanganan masalah sengketa di Mahkamah Konstitusi, dilakukan maksimal 21 hari sesuai perundangan yang berlaku. Dan sesuai permintaan DPR, jangka waktu tersebut, apa mungkin dapat diperpendek mengingat masih banyak persoalan, sehingga tidak harus berlarut-larut.

Namun demikian dipersingkat masa kampanye, adalah tantangan bagi partai kecil yang baru ikut pemilu kali ini. Partai kecil atau bagi calon legislasi yang akan maju perlu pendekatan pada masyarakat, mengenalkan program-programnya. Interaksi efektif diperlukan untuk bisa mengenalkan program-programnya kepada warga.

Pendekatan bukan berarti harus tergelincir pada permainan politik uang. Karena panitia penyelenggaraan harus juga waspada pada permainan politik uang, yang dari ke pemilu ke pemilu tetap sulit ditangkap, ibarat gas, ada baunya tetapi sulit bisa dilihat apalagi ditangkap. Nah, masyarakat yang kemudian perlu dikuatkan untuk tidak terjatuh dalam politik uang yang akan menyengsarakan publik itu sendiri. (\*)

# 'Ontran-ontran' Borobudur

Heri Priyatmoko

CANDI Borobudur merampok perhatian khalayak. Bukan lantaran keunggulan parasnya di kala senja menjemput atau perusakan heritage seperti tahun 1980an. Ontran-ontran ini dipicu oleh rencana perubahan harga tiket, mengingat kondisi cagar budaya itu diawatarkan tidak kuasa menampung ribuan pengunjung saban harinya. Guna membatasi jumlah wisatawan, pemerintah mewacanakan pelancong lokal yang hendak naik ke wilayah inti atau puncak merogoh kocek Rp 750.000.

Mencuatnya kasus tiket tersebut memaksa kita melongok kondisi bangunan kuno yang dibangun atas titah dinasti Syailendra sebagai penguat agama Buddha Mahayana. Candi di telatah Magelang ini sedari lama mencuri perhatian kaum cerdik pandai. Tak kurang filolog Poerbatjaraka menjemihkan persoalan toponim atau sejarah asal-usul daerah. Ia menyebut perkataan 'Boro' sama dengan 'Biara'. Sehingga Borobudur diartikan 'Biam Budur'. Penjelasan ini didasari temuan Poerbatjaraka berupa pondasi batu bata dan sebuah genteng perunggu di halaman barat laut candi tahun 1952.

### Kampung Tua

Keterangan ini ditangkis arkeolog De Casparis dengan bukti prasasti sekitar 842 Masehi. Tersurat perkataan 'Bhumisabhara budhara' sebagai sebutan sebuah bangunan suci pemujaan nenek moyang. Casparis memperkirakan bahwa Bhumisambhara Bhudhara dalam bahasa Sanskerta yang berarti iBukit himpunan kebajikan sepuluh tingkatan bodhisattwa', adalah nama asli Borobudur. Gubernur Inggris, Thomas Raffles (1811-1816) menafsirkan lema 'Boro' dari bahasa Jawa kuno artinya 'Agung', dan 'Budur' diartikan 'Buddha'. Maka, kata itu digabung menjadi 'Sang Buddha yang Agung' (Soekmono, 1983).

Perkara tiket yang memanas ini justru membuka peluang baru bahwa wisatawan bisa diarahkan pula mengunjungi kampung tua yang mengada sedari abad VIII bersamaan dengan pembangunan situs



KIR-JOKO SANTOSO

nya bisa menjadi petunjuk atas keadaan di seputar Candi Borobudur di masa lampau. Candi dikelilingi puluhan desa yang masih tercatat dalam laman internet maupun peta.

Bukan sekadar hunian. Kampung kuno tersebut merupakan jejak historis interaksi penduduk Magelang klasik dengan lingkungannya. Dari pengamatan dan pengalamannya, mereka memiliki gambaran tertentu perihal lingkungan hidupnya, yang disebut citra lingkungan. Secara teoritis, citra lingkungan melukiskan persepsi warga tentang struktur lingkungan, fungsi lingkungan, tindakan orang terhadap lingkungan, serta relasi manusia dengan lingkungan.

### Kearifan Ekologi

Ada sederet kearifan ekologi yang lahir

dari citra lingkungan. Contohnya, pohon beringin di Magelang dikeramatkan dan tidak boleh diotak-atik, bahkan dijadikan toponim. Realitas ini sebenarnya memuat pengetahuan bahwa akar pohon beringin menyimpan cadangan air. Tidak jarang kearifan ekologi tersebut bergeser atau takhayul.

Ambillah contoh, di Magelang dan beberapa daerah lainnya memiliki kedung atau bagian sungai yang dimili keramat. Warga dilarang menangkap ikan yang diikuti ritual tertentu. Demikian pula dengan hutan atau kebun yang ikut dikeramatkan. Sepintas terlihat tidak logis. Tetapi sesungguhnya bisa dimaklumi secara ilmiah. Pengamatan lingkungan bertujuan melindungi sumberdaya genetis. Di tempat itu ikan, burung, dan satwa lainnya bakal aman dari penangkapan dan perburuan. Fungsi hidrologi hutan dan sungai juga terjaga dengan pengamatan itu.

Semoga polemik tiket ini disikapi dengan bijak. Pasaunya, Candi Borobudur sebagai salah satu keajaiban dunia dan ruang sembahyang itu tidak bisa diperlakukan seandainya. Memang pengunjung yang sembarangan dan bermental buruk masih bergentayangan di situs bersejarah di Indonesia. Demi konten, mereka mengabaikan etika. □

\*Heri Priyatmoko MA, Dosen Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma.

### Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email [opinir@gmail.com](mailto:opinir@gmail.com) dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.